

Accepted: Januari 2024	Revised: Februari 2024	Published: Maret 2024
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA: MERETAS UPAYA ANTISIPATIF DI TENGAH OPTIMISME IMPLEMENTATIF

Mohamad Arif Majid

STIT Ibnu Sina Malang, Indonesia

Email : Mohamadarifmajid76@gmail.com

Abstract

Discussion on the dynamic of the educational world has always been interesting because there is an plenty of issues that emerge in the process of humanizing humans. This can be the debate on the values or even the issues on how to create and strengthen the standard of value, particularly, when the value shift occurs. This article focuses on the policy of Merdeka Belajar Kampus Merdeka/MBKM (Freedom of Learning Independent Campus) which has been implemented for years based on the minister's goodwill to give opportunities to university students to get experiences from different fields of study. Learning knowledge other than their expertise is something new and good only if its spirit is to approach the quality of knowledge professionalism. However, if this results in reducing the lessons or subjects students have to learn, they could, in the opposite way, direct students to move farther from professionalism. In addition, it is also hoped that students would not be imprisoned into the new style of capitalism modus.

Keywords: *anticipatory, critic, MBKM, optimism*

Abstrak

Dinamika dunia Pendidikan sebenarnya selalu menarik untuk dibahas, karena dalam proses memanusiakan manusia sesungguhnya sarat dengan problematika tidak saja soal tarik-menarik antar nilai, lebih dari itu adalah bagaimana melahirkan dan menguatkan standar nilai terutama disaat terjadi pergeseran nilai. Artikel ini secara lebih khusus membahas tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah berjalan beberapa tahun atas keinginan baik Menteri Nadiem memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mendapat pengalaman lapangan bahkan pengetahuan lain diluar keahlian yang ditekuni adalah memang sesuatu yang baru dan baik. Yang demikian itu dinilai baik jika semangat pelaksanaannya adalah untuk mendekati pada kualitas profesionalisme ilmu. Namun jika yang terjadi adalah itu diambil dengan mengurangi porsi perkuliahan atau mata kuliah yang seharusnya ditempuh mahasiswa, maka sungguh bisa dikhawatirkan yang akan terjadi justru hal yang sebaliknya, menjauh dari profesionalisme ilmu dan terjebak pada modus kapitalisme gaya baru. Semoga hal demikian tidak akan terjadi kepada mahasiswa yang mengikuti kebijakan baru ini.

Kata kunci: Antisipatif, kritik, MBKM, optimisme

Pendahuluan

Pendidikan yang dikembangkan dalam dunia pendidikan pada hakikatnya ialah pendidikan yang memerdekakan manusia. Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara adalah tokoh yang menyuarakan dan memperjuangkan semangat dalam dunia pendidikan. Namun seringkali praktik pendidikan yang terlaksanakan tidak sejalan dengan hakikat pendidikan yang semestinya. Dunia pendidikan harus mendapat sorotan lebih agar dapat berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan anak didik serta kebutuhan- kebutuhannya. Namun sebagian lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, masih menggunakan konsep atau metode klasik yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan (Mariati, 2021:749-761). Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang menuju kepada penanaman karakter berakhlak mulia. Melihat kenyataan- kenyataan yang terjadi, para pemikir pendidikan berusaha mengagas pemikiran tentang pendidikan bagi harkat kemanusiaan.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Adapun Peraturan Mendikbud (Permendikbud) yang menjadi landasan penerapan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Yusuf, 2021:120-133)

Merdeka belajar bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih bermakna lagi. Adapun secara umum program ini bukan untuk menggantikan program yang telah berjalan, namun bertujuan untuk pembangunan bangsa dan memberdayakan masyarakat di Negara Indonesia. Merdeka belajar yang digagas Kemendikbud menawarkan proses pembelajaran yang lebih sederhana. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

“Merdeka Belajar” yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, memahami dan mengubah cara pandang pendidikan dengan kacamata aliran filsafat progresivisme perlu dilakukan. Hal ini karena, progresivisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berasumsi bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang unik dan luar biasa serta dapat mengatasi berbagai permasalahan yang mengancam manusia itu sendiri. Progresivisme menghendaki adanya asas fleksibilitas demi memajukan pendidikan. Untuk tujuan itu, menurut John Dewey, pendidikan harus bersifat demokratis. Dalam konteks ini, pendidikan lebih berfungsi memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik, sehingga potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang dengan baik. Berangkat dari sini, pendidik hendaknya memandang peserta didik sebagai komunitas yang selalu khas dan unik (Mustaghfiroh, 2020:141-147), sehingga pendidik diharapkan mampu mengeksplorasi kemampuan, kecerdasan, kecenderungan, minat, dan bakat peserta didik yang sangat beragam. Oleh karena itu, salah satu ukuran penting untuk menilai keberhasilan pendidikan adalah dengan melihat sejauh mana pendidikan itu mampu mengeksplorasi

kecerdasan, minat dan bakat peserta didik, serta mengembangkan potensi-potensi tersebut secara baik dan maksimal.

Metode Penelitian

Dalam penelitian menggunakan studi literatur tentang kebijakan penerapan MKBM di perguruan tinggi. Berbagai artikel yang berasal dari jurnal nasional dengan aplikasi publish or perish sebagai alat pencarian artikel ilmiah dengan menginput kata kunci merdeka belajar kampus merdeka. Artikel yang relevan diurutkan berdasarkan tahun yang selanjutnya dipilih artikel yang sesuai dengan kajian yang akan dilakukan terkait dengan kurikulum merdeka kampus merdeka (MBKM) selama 5 tahun terakhir. Semua judul yang relevan diunduh untuk diseleksi kembali berdasarkan abstrak. Penulis membaca abstrak dengan detail terkait dengan tujuan, metode dan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan dampak dan tantangan dari diberlakukannya MBKM bagi pendidikan tinggi. Dilihat dari sisi tata kelola oleh perguruan tinggi dan respon mahasiswa dengan adanya MBKM ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan untuk merespon transformasi pembelajaran. Merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi, Menteri Nadiem mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun rencana strategis dalam mempersiapkan kompetensi mahasiswa secara matang untuk lebih siap menghadapi tantangan zaman (Yanuarsari, 2021:1683-1688). Dalam hal ini, beberapa teori pengelolaan perguruan tinggi seperti *the Triple Helix Model* telah merumuskan model hubungan mutual antara perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan kompetensi manusia, dunia industri sebagai pengguna sumber daya manusia, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang mengatur peran kedua pihak lainnya (Putra, 2021: 5256-5264).

Tokoh Utama Pemberi Inspirasi

Adalah seorang tokoh Pendidikan di Indonesia, beliau bernama RM Soewadi Soeryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta yang kemudian terkenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara merupakan putra GPH Soeryaningrat/ cucu Sri Paku Alam III pernah mengatakan *bahwa tujuan pendidikan pada hakikatnya membuat hidup menjadi mandiri, tidak bergantung pada orang lain* inilah yang kemudian dijadikan landasan terbentuknya kebijakan Merdeka Belajar oleh Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Anwar Makarim saat ini. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai MBKM, ada baiknya disampaikan disini biografi Ki Hajar Dewantara sebagai inspirasi utama Menteri Nadiem menggulirkan program MBKM ini.

Sebagai bangsawan Jawa, Ki Hadjar Dewantara memiliki hak luas untuk mengenyam pendidikan ELS (Europeesche Lagere School) – Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Selanjutnya mendapat kesempatan masuk STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen) biasa disebut Sekolah Dokter Jawa. Rekam jejak sejarah melukiskan sosok Ki Hadjar Dewantara menjadi seorang tokoh penting dalam dunia pendidikan nasional. Sebagai penghormatan pemerintah Republik Indonesia memberikan amanah dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan RI, mengangkat Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950. (Wiryopranoto, 2017). Banyak sekali karya-karya monumental Ki Hadjar Dewantara

diantaranya yang sudah sangat kita kenal adalah buku bagian pertama: tentang Pendidikan, buku bagian kedua: tentang Kebudayaan, buku bagian ketiga: tentang Politik dan Masyarakat, buku bagian keempat: tentang Riwayat dan Perjuangan Hidup Penulis: Ki Hadjar Dewantara, (Dewantara, 1962). Seperti kita ketahui, Ki Hadjar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia.

Berbicara mengenai tokoh Ki Hadjar Dewantara tentunya sangat melekat dengan konteks dunia pendidikan. Ki Hadjar Dewantara memandang pendidikan untuk membangun dan mengembangkan sisi budi pekerti atau kekuatan batin, intelektual, dan jasmani individu siswa. Pendidikan dipandang sebagai upaya untuk membimbing apa yang menjadi potensi peserta didik, sehingga peserta didik dapat berfungsi secara personal maupun sosial, sehingga layak disebut dengan sebutan kodratnya manusia. Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan bukan hanya sekedar memberikan ilmu saja, tapi Pendidikan dengan sendirinya memperoleh kualitas intelektual sekaligus membangkitkan kesadaran nasional. Inilah yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara sebagai hakikatnya jiwa yang memiliki unsur cipta, rasa, dan karsa (Dewantara, 2012)

Jika kita menguraikan mengenai pendidikan khususnya pembelajaran, maka Ki Hadjar Dewantara mengemukakan lima prinsip dasar pembelajaran, yaitu:

1. Prinsip Kemerdekaan. Kemerdekaan memiliki arah supaya peserta didik dapat dengan bebas mengekspresikan cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar. Hal ini selaras dengan semboyan "*Tutwuri Handayani*", Dimaknai dengan mengikuti dari belakang dan memberikan pengaruh. Mengikuti dari belakang dengan memberikan kebebasan kepada anak didik tanpa meninggalkan pengawasan.
2. Prinsip Kebangsaan. Prinsip kebangsaan berarti tidak bertentangan dengan kemanusiaan, hal tersebut dimungkinkan mengingkat peserta didik akan hidup dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Pengembangan rasa kebangsaan selaras dengan mengembangkan nasionalisme yaitu memupuk rasa kebangsaan sendiri dalam membina pergaulan dan kerja sama dengan bangsa lain di dunia.
3. Prinsip Kebudayaan. pembelajaran harus sesuai dengan prinsip kebudayaan tempat agar hasil belajar bisa diterima di lingkungan tempat tinggal. Tujuan dari prinsip kebudayaan yaitu membimbing anak didik agar tetap menghargai serta mengembangkan kebudayaan sendiri. Manakala ada kebudayaan yang dapat memperindah, memperhalus dan meningkatkan kualitas kehidupan, hendaknya diambil. Tetapi jika berpengaruh sebaliknya, sebaiknya ditolak saja
4. Prinsip Kemanusiaan. Prinsip ini mengarahkan pada peserta didik untuk hidup Bersama atas dasar kegotongroyongan dan saling mengasihi dan saling mengasuh dan membimbing agar bisa menjadi pribadi yang baik, sehingga dalam pelaksanaan selalu diorientasikan untuk kepentingan Bersama. Prinsip yang terakhir
5. Prinsip Kodrat alam. Prinsip Kodrat alam mengarahkan peserta didik supaya tidak melalaikan kewajibannya terhadap Tuhan, Lingkungan, masyarakat, maupun diri sendiri. Ki Hajar Dewantara melaksanakan pendidikan budi pekerti dengan cara "*Tutwuri Handayani*", yang dikenal dengan sistem *Among*. *Among* berarti asuhan dan pemeliharaan dengan suka duka dengan memberi kebebasan anak asuhan bergerak menurut kemauannya.

Prinsip-prinsip di atas merupakan Sumbangsih pemikiran Ki Hadjar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia yang memiliki nilai besar. Salah satu konsep pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara adalah pembelajaran harus memfokuskan pada kemampuan peserta

didik dalam membangun pemikirannya. Ki Hadjar Dewantara memiliki gagasan mengenai pendidikan berdasarkan pada asas kemerdekaan yang dapat dimaknai bahwa peserta didik memiliki hak untuk merdeka dalam arti mereka punya kemerdekaan untuk mengekspresikan potensi berpikirnya. Dengan kata lain pendekatan pembelajaran tersebut berpusat pada peserta didik (*student center learning*).

Disini melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik, karena itu hanya akan membuat jiwa merdeka menjadi mati sekaligus mematikan kreativitas. Peserta didik harus di mong (didampingi), makanya ini dikenal dengan *system among*. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara seorang pendidik hanya sebagai fasilitator yang membantu peserta didik hal ini berpandangan bahwa peran guru bukan hanya sekedar memberikan informasi pada pengembangan kemampuan mentalnya, namun harus memotivasi peserta didik untuk mau melek dan peduli dengan apa yang terjadi di depan mereka, mencari pemahaman, merefleksikan dan secara kritis melakukan olah pikir. Tahun 2019, tepatnya ketika acara Hari Guru Nasional, Nadiem Anwar Makarim mencetuskan konsep “Pendidikan Merdeka Belajar”. Konsep pendidikan merdeka belajar merupakan suatu jawaban atas apa yang menjadi tuntutan pada sistem pendidikan di era 4.0.

Menteri Nadiem Makarim menguraikan mengenai merdeka belajar yang diartikan sebagai kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan berpikir yang ditentukan oleh guru. Konsep merdeka belajar yang di rumuskan oleh Nadiem Makarim sejalan dengan ajaran yang dijelaskan oleh Ki Hadjar Dewantara yang menekankan unsur penting prinsip kemerdekaan pada peserta didik, diilustrasikan pendidikan bukan hanya memenuhi kepala peserta didik dengan materi-materi yang abstrak, memberikan pengetahuan, namun juga harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya untuk berdiri sendiri namun tetap dalam pantauan guru dan orang tua agar potensi nilai dirinya tidak ke arah hal negatif. Merdeka belajar fokus intinya adalah kebebasan mencari “pengalaman” dengan tidak bergantung pada orang lain dan kreatif Kuswandi, sehingga seorang pendidik diharapkan berperan sebagai motivator dalam menentukan keputusan memberikan hal yang terbaik untuk peserta didik.

Disisi lain, pendidik sebagai unsur utama dalam proses pendidikan seyogyanya harus lebih mengutamakan perkembangan peserta didik, dibandingkan dengan apa yang menjadi tujuan pribadi pendidik itu sendiri. Seorang pendidik juga diharapkan mampu mendidik peserta didik dengan memegang semboyan dari Ki Hadjar Dewantara yakni, *ing ngarsa sung tuladha* (dimuka memberi contoh), *ing madya mangun karsa* (di tengah membangun cita-cita), *tut wuri handayani* (mengikuti dan mendukungnya) sejalan dengan merdeka belajar yang digaungkan Mendikbud Nadiem Makarim mengharapkan pendidikan harus menjadi motor dalam mengambil suatu tindakan dalam kegiatan pendidikan yang intinya adalah memberikan hal yang terbaik untuk peserta didik, serta guru diharapkan mengutamakan murid di atas kepentingan karirnya.

Menteri Nadiem juga mengatakan guru harus mempunyai jiwa yang merdeka terlebih dahulu baru mengajarkannya pada peserta didik. Dengan demikian guru harus mempunyai jiwa mendidik yang matang, tanpa adanya rasa tekanan sehingga memiliki kemampuan menyalurkan ilmunya kepada peserta didik secara tepat, dan begitu juga dengan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan pendidikan pada hakikatnya membuat hidup menjadi mandiri, tidak bergantung pada orang lain, itu kemudian dijadikan landasan terbentuknya kebijakan “Merdeka

Belajar”. yakni keduanya sama-sama menekankan adanya kemerdekaan dan penghargaan hakiki pada peserta didik.

.Menteri Nadiem Anwar Makarín, telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), program ini merupakan merdeka belajar episode kedua. Merdeka belajar adalah kebebasan mutlak yang dimiliki oleh setiap warga belajar (Hendri, 2020). Kebijakan yang dibuat memberikan peluang pembelajaran secara inventif, dengan menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa yang belum tersedia, mahasiswa terjun langsung dalam kehidupan nyata, Dosen-dosen wajib untuk menyusun, melaksanakan, dan menilai proses pembelajarannya untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu guna memasuki dunia kerja. Dosen-dosen dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan teknologi sebagai perantara proses pembelajaran tanpa mengurangi hakikat pendidikan. Sementara mahasiswa diminta untuk tetap aktif dan mandiri walau dalam pembelajaran jarak jauh.

Menyiapkan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan zaman, mengimbangi perubahan kemasyarakatan, kebiasaan (budaya), lapangan kerja dan kemajuan teknologi yang besar. Kebijakan *link and match* tidak saja dengan kalangan industri, dan lapangan pekerjaan pada masa yang akan datang diharapkan paradigma orientasi pendidikan tidak lagi *supply minded* tetapi kearah *demand minded* (kebutuhan pasar) yang berubah dengan cepat. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga pendidikan penghasil calon pengajar, dituntut untuk dapat menyusun dan melakukan proses pembelajaran lebih bervariasi dan berinovasi agar para mahasiswa dapat menggapai capaian pembelajaran mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara maksimal dan signifikan, MBKM diharapkan mampu memenuhi tuntutan itu, merupakan wujud proses pembelajaran di perguruan tinggi yang independen dan fleksibel sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif, tidak membatasi, dan sesuai dengan keperluan mahasiswa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga pendidikan penghasil calon pengajar, dituntut untuk dapat menyusun dan melakukan proses pembelajaran lebih bervariasi dan berinovasi agar para mahasiswa dapat menggapai capaian pembelajaran mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara maksimal dan signifikan.

Program MBKM merupakan kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mulai diterapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Pokok-pokok dari kebijakan MBKM meliputi: (1) pembukaan program studi baru yang diatur pada Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi yang diatur pada Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (3) perguruan tinggi badan hukum yang diatur pada Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Permendikbud No 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi yang diatur pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu kunci keberhasilan dari implementasi Kebijakan MBKM adalah mengupayakan agar proses pembelajaran di Perguruan Tinggi lebih otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Dalam hal ini, program studi berupaya mengembangkan kurikulum dengan

menyesuaikan perkembangan zaman dan menghasilkan alumni siap kerja sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan

Konsep model pengembangan kurikulum program studi dan implementasi program kegiatan MBKM. Model pengembangan kurikulum meliputi rancangan kebijakan MBKM di perguruan tinggi, rancangan standar operasional baku pelaksanaan MBKM, Rancangan Kerjasama akademik dan identifikasi kebutuhan sumberdaya pendukung program. Sedangkan Implementasi Program kegiatan meliputi Rancangan program kegiatan MBKM, penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan MBKM, dan konversi alih kredit/Pengakuan SKS. Hasil dari kajian literatur berupa model Pengembangan kurikulum program studi dengan mengadaptasi kebijakan MBKM mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran.

Pelayanan pemenuhan masa dan beban belajar sebagai hak belajar mahasiswa yaitu (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, selama minimal 84 SKS. Yang merupakan mata kuliah inti yang wajib yang akan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil Lulusan program studi, (2) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di lingkungan UNCP, Maksimal 20 Sks sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat mahasiswa, dan (3) Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan Lain dan Non PT melalui kegiatan Magang Usaha, Pertukaran Mahasiswa, KKN Tematik, Bakti Sosial dan Tugas Akhir. Maksimal 40 Sks. Sedangkan Implementasi Kurikulum MBKM melalui 5 program kegiatan yaitu Program Pertukaran Mahasiswa, Pengenalan Lingkungan Persekolah melalui program *Guru Penggerak daerah terpencil*, Magang Usaha, KKN Tematik "*Edukasi Literasi Digital*", dan Bakti Sosial.

Dalam hal ini, program studi berupaya mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan menghasilkan alumni siap kerja sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. tentang adaptasi merdeka belajar kampus merdeka menjadi kurikulum program studi, hendaknya difokuskan pada Konsep model pengembangan kurikulum program studi dan implementasi program kegiatan MBKM. Model pengembangan kurikulum meliputi rancangan kebijakan MBKM di perguruan tinggi, rancangan standar operasional baku pelaksanaan MBKM, Rancangan Kerjasama akademik dan identifikasi kebutuhan sumberdaya pendukung program. Sedangkan Implementasi Program kegiatan meliputi Rancangan program kegiatan MBKM, penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan MBKM, dan konversi alih kredit/Pengakuan SKS.

Keahlian yang harus dimiliki untuk menyongsong Era Big Data menstimulasi pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus memiliki keterampilan digital dan berpikir kreatif (Junaid, 2020:122-129). Selain itu, pemerintah juga berupaya menekan angka tingkat pengangguran nasional dengan mensinkronkan Pendidikan dengan dunia kerja dan industri, sehingga lulusan perguruan tinggi merupakan lulusan siap kerja dengan bidang keahlian dan kebutuhan dunia kerja (Arifin dkk, 2020). Upaya ini yang diwujudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan meluncurkan kebijakan baru, yakni Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (Widiyono dkk, 2021)

Langkah Teknis Persiapan MBKM

Tahap perencanaan meliputi perumusan capaian pembelajaran yang dimulai dengan penetapan profil lulusan, penjabaran profil ke dalam kompetensi, penjabaran kompetensi ke dalam capaian pembelajaran. Profil ditetapkan berdasarkan hasil analisa terhadap kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, profil program studi disusun oleh kelompok program studi yang sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang menjadi rujukan. Berikutnya, pelibatan pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusan sebagai indikator standar pencapaian mutu lulusan, Penetapan kemampuan/skil dasar lulusan berupa (1) kognitif; (2) afektif; dan (3) psikomotorik yang ketiganya merupakan unsur capaian pembelajaran lulusan.

Selanjutnya, rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi merupakan ukuran kemampuan lulusan suatu program studi. Dimana CPL dirumuskan berdasarkan SN-Dikti, berorientasi KKNI, dan menggambarkan visi, misi Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi. Untuk mengimplementasikan kurikulum MBKM, Program Studi merencanakan pelayanan pemenuhan hak belajar mahasiswa, yakni:

- a. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada program studi sendiri, minimal 84 SKS. Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah inti atau wajib bagi setiap mahasiswa untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil Lulusan program studi
- b. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada program studi berbeda maksimal 20 Sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain merupakan mata kuliah pilihan untuk menunjang profil lulusan sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat mahasiswa.
- c. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan Lain dan Non PT melalui kegiatan Magang Usaha, Pertukaran Mahasiswa, KKN Tematik, Bakti Sosial dan Tugas Akhir. Maksimal 40 Sks.

Nilai Profetik dalam MKBM

Konsep merdeka belajar sama dengan pendidikan humanistik yang menekankan pada kebebasan, pilihan, kepekaan dan tanggung jawab peserta didik. Pendidikan humanistic menerapkan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian peserta didik, dan berfokus pada potensinya untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka miliki. Bahkan menurut para ahli pendidikan, dalam penyusunan dan penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Dan merdeka belajar Menurut Ki Hajar Dewantara kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya peserta didik berpikir. Yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain akan tetapi biasakan peserta didik mencari sendiri segala pengetahuannya dengan menggunakan pikiran sendiri. Hal itu karena seorang peserta didik pada dasarnya mampu berpikir untuk menemukan suatu pengetahuan melalui dirinya (Nofri, 2020:27)

Merdeka belajar tentu bukanlah konsep belajar merdeka seutuhnya tanpa adanya aturan pada implementasinya. Kebebasan yang dimaksud terletak pada bagaimana seorang pendidik melaksanakan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan serta bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam mengembangkan bakat dan kemampuannya, peserta didik diberikan

keleluasaan dalam mengembangkan bakat dan kemampuannya agar bisa berkembang dengan baik. Sementara seorang pendidik sebagai fasilitator pada pelaksanaan pembelajaran yang akan ditempuh oleh peserta didik tersebut.

Namun, apabila dalam merdeka belajar yang menitik beratkan pada peserta didik (*Student centred*) yang tidak lagi bertumpu pada pendidik (*teacher centred*) tidak diimbangi dengan penguatan-penguatan nilai luhur, maka akan dapat membuka peluang tergesernya tujuan pendidikan nasional yang *bertujuan untuk membentuk peserta didik dengan memiliki ilmu pengetahuan dan terbentuknya bakat serta memiliki karakter luhur dalam diri peserta didik*. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan nilai-nilai profetik dalam pelaksanaan merdeka belajar agar tujuan pendidikan nasional tersebut tercapai dengan sempurna.

Pendidikan profetik (kenabian) adalah proses transfer pengetahuan (Knowledge) dan nilai (*values*) yang bertujuan untuk membangun akhlak moral serta mendekatkan diri kepada Tuhan serta tercapainya intelektual-emosional, akhlak dan moral peserta didik yang dapat berkembang secara utuh. Dan dengan konsep kenabian tersebut diharapkan merdeka belajar tidak menjadikan peserta didik kehilangan karakter dalam dirinya, semauanya dalam belajar serta mencegah terjadinya karakter tidak baik pada peserta didik tersebut (Ismi dkk, 2013:208). Penguatan nilai-nilai profetik ini harus diterapkan dalam keseluruhan proses dan tahapan merdeka belajar. Baik dari penyusunan kurikulum, silabus, RPP serta perangkat pembelajaran lainnya. Dalam penguatan ini tidak hanya penguatan sepihak dalam diri peserta didik, Akan tetapi juga dilaksanakan pada diri pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Dalam pelaksanaan merdeka belajar, seorang pendidik harus melaksanakan nilai profetik dalam segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Misalnya, dalam memberikan materi tentu memperhatikan karakter, kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Begitu pula dalam penggunaan metode pembelajaran, maka metode yang diterapkan merupakan metode yang akan menjawab terhadap kebutuhan peserta didik. Seorang pendidik adalah pribadi yang bertugas membantu siswa/ mahasiswa mengembangkan dirinya yaitu dengan cara mengenal dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan potensi yang mereka miliki. Menurut Athiyah Al-Abrasyi, seorang pendidik wajib memiliki sifat-sifat keadilan, kesucian dan kesempurnaan dalam keseluruhan pelaksanaan pembelajaran. Misanya, ia memberikan perhatian kasih sayang, pemenuhan kebutuhan bimbingan, pengajaran serta pemberian nilai. Apabila sifat-sifat sebagai pendidik tersebut tidak dimiliki oleh seorang pendidik, maka ia tidak akan disenangi oleh peserta didiknya dan apabila terjadi proses pembelajaran maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal (Umar, 2018)

Selain itu, niat ikhlas harus dimiliki pendidik dalam melaksanakan pembelajaran dikarenakan sasaran dari pelaksanaan pendidikan adalah hati setiap peserta didik. Apabila suatu pekerjaan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, maka seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan kemudahan. Sementara penguatan nilai-nilai profetik pada peserta didik dalam merdeka belajar juga merupakan suatu keniscayaan. Peserta didik merupakan insan yang tetap membutuhkan pimbingan dari orang dewasa (pendidik) agar dalam melaksanakan merdeka belajar tidak belajar semauanya sendiri. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu (UU Diknas pasal 1 ayat 4). Peserta didik dalam Merdeka belajar dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan dan kreativitas dalam memecahkan Segala

persoalan yang dihadapinya dengan berbekal kecerdasan yang dimilikinya. Menurut John Dewey dalam konsep progresivisme ia menganggap bahwa seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan serta menyempurnakan lingkungan dirinya dengan menggunakan kecerdasan yang dimiliki dengan metode ilmiah dalam menyelesaikan segala persoalan dalam dirinya maupun dalam kehidupan social (Umar, 2018).

Peluang dan Tantangan Program MBKM

Perguruan tinggi sebagai fasilitator besar dituntut untuk mampu memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran diluar program studi dan diluar perguruan tinggi. Tantangan yang muncul di kalangan akademisi adalah melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi. Kondisi ini membuat kompetensi lulusan menjadi kurang spesifik dalam keilmuannya jika tidak dipikirkan ketika membuat rekonstruksi kurikulum. Dari rekonstruksi ini diharapkan terpenuhinya minat-bakat yang ada pada potensi diri mahasiswa bisa berkembang. Disamping itu aspek lain yang tidak kalah penting yaitu pengembangan karakter. Pengembangan ini penting untuk menyeimbangkan unsur intelektual di bidang akademis dengan emosional, moral dan spiritual (Faiz dkk, 2020)

Kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” ini memiliki tantangan tersendiri, disamping peluang positif yang diperoleh. Perguruan tinggi harus memiliki rancangan kurikulum yang tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya ketimpangan sumber daya manusia dan fasilitas antar perguruan tinggi juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan kebijakan ini kurang berjalan maksimal, sebagai contoh akses internet yang belum tersedia merata di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan selanjutnya mengenai standar penilaian, dimana standar penilaian antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya akan berbeda serta kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa yang berbeda-beda dan sumber daya manusia input suatu universitas pun berbeda-beda (Arifin dkk, 2020). Dimana mahasiswa bisa memperoleh pengalaman dan konteks keilmuan di perguruan tinggi untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan.

Peluang kebijakan MBKM dalam pembelajaran setidaknya lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan mahasiswa bisa terlibat secara langsung. Model pembelajaran yang beragam, serta membawa generasi masa akan datang unggul diantara negara-negara lainnya. Namun program MBKM bisa berimplikasi langsung pada masalah pendanaan yang bisa saja ini adalah kendala baru bagi orang tua mahasiswa. Peluang lainnya dalam kebijakan MKBM yakni pendidikan humanisme, dimana pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan potensi yang dimiliki setiap individu dan memberi kebebasan dalam proses pendidikan sehingga untuk membangun kesadaran sebagai makhluk sosial ciptaan tuhan. Terlepas dari tantangan dan peluang kebijakan MBKM ini, tak kalah penting Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang unggul, kompetitif dan profesional dalam mengembangkan dan mengintegrasikan keislaman, keilmuan, kemanusiaan dan keindonesiaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran model *research based learning*, *problem based learning*, dan *contextual teaching & learning* dalam rangka *quality assurance*. Serta mengembangkan *networking* dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan, dan lembaga lainnya, baik nasional maupun internasional untuk menerapkan program MBKM.

Tidak menutup mata, secara filosofis kebijakan Kampus Merdeka sangat bagus dengan membuka kotak sekat keilmuan dalam suatu prodi. Harapannya, mahasiswa memahami ilmu lintas disiplin yang dapat meningkatkan kemanfaatan dari ilmu yang mereka pelajari sebelumnya. Namun perlu dipertimbangkan juga bahwa Indonesia adalah negara yang akses kesetaraan dalam mengakses Pendidikan tinggi masih mengalami kesenjangan, artinya hanya orang menengah ke atas saja yang bisa kuliah. Apalagi sekarang kuliah makin mahal, bisa diyakini jika Program Kampus Merdeka ini dilanjutkan, maka kesenjangan makin lebar yang akan terjadi di Indonesia. Karena yang bisa kuliah semakin menikmati fasilitas pengembangan diri yang lebih layak, sementara yang miskin tetap sulit untuk bisa kuliah akhirnya harus menikmati pahitnya upah yang rendah (Bimaputra, 2023). Juru Bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) berpendapat bahwa adanya program magang, mahasiswa hanya akan mengerjakan perintah atasan tanpa bisa berinovasi, ini semua terhubung dengan omni bus law dan lahirnya kebijakan dan program termasuk MBKM demi kepentingan investasi. Inilah bentuk baru dari perbudakan modern berkedok magang (Elitos, 2022)

Masukan bahkan kritik ontologis terhadap kebijakan MBKM bahwa hakekat pendidikan itu adalah menanamkan tanggung jawab ilmu, karenanya tanggung jawab atas pilihan jurusan itu adalah nilai yang ingin ditanamkan pada diri mahasiswa sebagai kaum berpikir. Diberikan kebebasan pada setiap individu untuk memilih disiplin ilmu yang diminati. Otoritas diri untuk menjatuhkan pilihan inilah yang seharusnya dihargai dengan memberi fasilitas pembelajaran terbaik oleh perguruan tinggi. Bahwa semua mahasiswa punya cerita dan liku-liku perjuangan sendiri untuk bisa masuk dan diterima di suatu PT tertentu sesuai jurusan yang diminati dengan sepenuh atau separuh keyakinan, itu juga hal biasa. Maka memberi kesempatan untuk mempelajari bidang/ ilmu lain dengan mengurangi porsi bidang/ ilmu di minat utama adalah sesuatu yang bisa merugikan mahasiswa.

Ontologi mengajarkan pada kita untuk melihat secara seksama hakikat sesuatu dengan sebenarnya dengan senyatanya. Disini pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk keluar dari fak.ilmunya dan mempelajari ilmu lain (setara 40 SKS/ 2 semester) akan dilihat secara seksama, taruhlah dengan ilustrasi seorang mahasiswa yang diterima di fakultas hukum dan hobi elektro. Saat mengikuti MBKM dia mantab untuk magang di salahsatu perusahaan elektro selama satu tahun, selama itu dia sangat antusia dan mengerjakan tugas-aktifitas yang di berikan dengan senang dan semangat karena memang sesuai hobinya. Setelah selesai magang genap dua semester dia harus kembali mengikuti perkuliahan di fak.hukum dengan seadanya, karena fak.hukum sebenarnya hanya pilihan kedua saat SNMPTN dan pilihan pertamanya fak. teknik elektro. Inilah salahsatu bukti bahwa magang bisa memisahkan bahkan menjauhkan mahasiswa dari profesionalisme ilmu yang dialami. Yang prinsip adalah jika MBKM bisa mendekatkan pada profesionalisme ilmu itu yang diinginkan, namun jika MBKM justru menjauhkan dari profesionalisme ilmu itu yang dikhawatirkan terjadi.

Harus diikuti dengan serangkaian langkah dan aturan teknis agar tidak terjauhkan dari profesionalisme memang iya, namun disini ontologi berposisi pada yang prinsip karena hakekat itu tentang prinsip dan bukan tentang teknis. Menghantarkan mahasiswa sesuai minat ilmu yang dipilih sampai tuntas menjadi sarjana yang professional secara bertanggung adalah tugas besar tiap perguruan tinggi. Maka jika untuk menjadi sarjana hukum harus menyelesaikan 160 SKS lulus, itulah yang harusnya diwujudkan. Terlepas mahasiswa masuk dengan sepenuh maupun setengah

hati itulah yang disebut tanggung jawab, salahsatu nilai utama Pendidikan adalah menanamkan rasa tanggungjawab dalam pilihan hidup. Untuk urusan hobi elektro silahkan saja dikembangkan namun tidak perlu dengan mengurangi porsi yang harus diselesaikan untuk menuntaskan 160 SKS. Inilah yang harus ditegaskan bahwa tugas kampus adalah menjaga konsistensi mahasiswa untuk tetap kokoh pada pilihan ilmunya, tidak malah memberi kesempatan selama satu tahun untuk mempelajari ilmu lain.

Meski itu tampak sebagai sesuatu yang menyenangkan dengan memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mendapat suasana baru, semacam refreshing dari kepenatan akademik, namun jika itu keluar dari pembentukan profesionalisme ilmu pada jurusan yang ditekuni, maka refreshing tersebut sesungguhnya bisa memisahkan mahasiswa dari keilmuannya atau bisa jadi justru mengkaburkan bahkan menjauhkan mahasiswa dari profesionalisme ilmunya sendiri. Kecuali jika seperti dicatatkan oleh Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko sebagai universitas tertua di dunia yang melandaskan pembelajaran lintas ilmu terpadu dengan masjid sebagai pusatnya. Akan tetapi, dari segi administratif akademik, diperlukan kajian lebih mendalam pada prodi serumpun yang memungkinkan untuk adanya kemerdekaan belajar lintas ilmu, termasuk menyiapkan perangkat penunjangnya. Sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi objek, tetapi fokus utama pendidikan itu sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tugas perguruan tinggi sekali lagi adalah memastikan mahasiswa mampu mendapatkan pelayanan akademik terbaik, dengan fasilitas terbaik, dan proses terbaik hingga tuntas semua SKS yang dibutuhkan sesuai dengan bidang ilmu yang diminati mahasiswa. Sementara tugas negara adalah memberi kepastian hukum, rasa aman, dan haluan yang jelas dan tegas mengenai arah pendidikan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara. Tri dharma perguruan tinggi telah menggariskan pendidikan, penelitian dan pengabdian bisa berjalan simultan. Secara teknis ada program KKN, PPL, PKL, dan semacamnya yang telah berusaha menyambungkan mahasiswa ke dunia realitas bersama masyarakat. Jika itu dirasa kurang efektif bisa ditingkatkan akselerasinya dengan memaksimalkan kerjasama antara kampus, masyarakat, dan dunia kerja. MBKM akan bermanfaat jika berposisi menjadi panduan teknisnya. Namun jika ternyata justru menjauhkan dari profesionalisme mahasiswa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja, itulah kemunduran yang sama-sama tidak kita inginkan.

Penutup

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dicetuskan Mendiknas Nadim Makarim guna memberikan peluang bagi para mahasiswa untuk menentukan sendiri dan lebih mendalami mata kuliah yang akan ditempuh (*student centered learning*). Keahlian yang harus dimiliki untuk menyongsong Era Big Data menstimulasi pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus memiliki keterampilan digital dan berpikir kreatif. Selain itu, pemerintah juga berupaya menekan angka tingkat pengangguran nasional dengan mensinkronkan Pendidikan dengan dunia kerja dan industri, sehingga lulusan perguruan tinggi diharapkan merupakan lulusan siap kerja dengan bidang keahlian sesuai kebutuhan dunia kerja.

Penerapan program MBKM mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pelayanan pemenuhan masa dan beban belajar sebagai hak belajar mahasiswa yaitu (a) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada

program studi sendiri, minimal 84 SKS mata kuliah inti/ wajib, ini akan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil Lulusan program studi (b) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di program studi lain maksimal 20 Sks sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat mahasiswa kedepannya, dan (c) Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan tinggi lain dan Non PT melalui kegiatan Magang Usaha, Pertukaran Mahasiswa, KKN Tematik, Bakti Sosial dan Tugas Akhir. Maksimal 40 Sks.

Hak belajar tiga semester di luar program studi yang diatur pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kesempatan baik yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa/i untuk mengembangkan potensi diri dan bakat-minat terpendam yang dimiliki masing-masing mahasiswa/i. Proses ini tentu saja penuh tantangan, namun melihat dengan kaca mata optimis justru karena adanya tantangan itulah potensi itu sesungguhnya akan terasah. Inilah yang berusaha difasilitasi oleh pemerintah saat ini yang sedang bersemangat mengikuti pemahaman bahwa salah satu kunci keberhasilan dari implementasi Kebijakan MBKM adalah mengupayakan agar proses pembelajaran di Perguruan Tinggi lebih otonom dan fleksibel.

Terlepas dari tantangan dan peluang kebijakan MBKM ini, tak kalah penting bahwa perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang unggul, kompetitif dan profesional dalam mengembangkan dan mengintegrasikan keislaman, keilmuan, kemanusiaan dan keindonesiaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran model *research based learning*, *problem based learning*, dan *contextual teaching & learning*. Artinya memang belum bisa diambil kesimpulan pasti bahwa program MBKM itu menuju peningkatan hasil pembelajaran berupa output maupun outcome yang benar-benar proporsional sesuai cita-cita ideal Pendidikan ataukah malah sebaliknya. Namun yang jelas sambil terus mendukung program MBKM ada baiknya bagi tiap-tiap stakeholder pendidikan senantiasa waspada dengan setiap bias program/ anomali pedagogik yang bisa saja sewaktu-waktu muncul berbalik menjadi suatu hambatan, gangguan, maupun ancaman yang tidak diinginkan dalam dunia pendidikan. Semoga semuanya berimplikasi positif.

Daftar Pustaka

- Arifin, S., & Muslim, M. O. H. Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1). 2020
- Dewantara. Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: MLP Taman Siswa. 2012
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Buku Panduan Merdeka Belajar : Kampus Belajar. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2000.
- Faiz, Aiman., Kurniawaty, Imas. Konsep merdeka belajar Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Progresivisme-Konstruktifisme. 2020.
- Fathiah Alatas, M.Si. Tantangan dan Peluang Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ismail, saiful godi,. Implementasi pendidikan profetik dalam pemebelajaran pendidikan agama Islam. *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 5, No.2, Desember. (308). 2013.
- Junaid, R., & Baharuddin, M. R. Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru melalui PKM Lesson Study. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2),122-129. 2020
- Mariati. Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 749–761. 2021.

- Mustaghfiroh, S. Konsep “ Merdeka Belajar ” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147. 2020
- Putra, I., & Nasori, A. Edukatif: *Jurnal Ilmu Pendidikan Pengukuran Mutu Pembelajaran Di Fkip Unja Dalam Upaya Membangun Generasi Economic Citizen Yang Mengelaborasi Program Mbkbm Kemendikbud*. 3(6), 5256–5264. 2021
- Umar, Bukhari. *Hadist Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadist*. Jakarta: Amzah. 2018
- Widiyono, A., Irfana, S., & Firdausia, K. Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 16(2). 2021
- Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1683–1688. 2021

Copyright © 2024 *Journal Salimiya*: Vol. 5, No.1, Maret 2024, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>